

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI REALISASI ANGGARAN PADA LAPORAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Annis Susanti^{(1)*}, Septa Riadi⁽²⁾ Deviana Sari

¹Direktorat jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan

²Fakultas Ekonomi Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Fakultas Ekonomi Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

*email: annis.susanti@gmail.com, devianasari.18@gmail.com, septa.riadi.sr@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada laporan keuangan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan pagu anggaran dan realisasi anggaran periode TA. 2017 sampai TA. 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuantitatif deskriptif. Data alokasi anggaran pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan periode TA. 2017 sampai TA. 2020 berdasarkan data OMPSPAN Kementerian Keuangan Republik Indonesia adalah menurun dengan persentase rata-rata sebesar 5,29%. Untuk tingkat efektivitas penyerapan anggaran periode TA. 2017 sampai TA. 2020 adalah pada kriteria efektif yaitu sebesar 81,87 % pada kriteria efektif dan efisiensi atas pelaksanaan kegiatan cukup efisien dengan rata-rata rasio efisiensi untuk TA. 2017-TA. 2020 sebesar 88,97%, sehingga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan harus terus ditingkatkan.

Kata Kunci: Efektivitas, Efisiensi, Anggaran, Laporan Keuangan.

Abstract : *This research aims to determine effectiveness and efficiency of the implementation APBN in financial statement of Directorate General of Surveillance for Marine and Fisheries Resources base on budget realization periode TA. 2017 until TA. 2020. Budget allocation data base on OMPSPAN from Ministry of Finance of the Republic of Indonesia is declining with average percentage of 5.29%. The level of effectiveness is in effective criteria, which is 81.87% and efficiency level ratio is in quite efficient, which is 88.97%. So, the effectiveness and efficiency at Directorate General of Surveillance for Marine and Fisheries Resources must continue to be increase*

Keyword: *Effectiveness, Efficiency, Budget, Financial Statement.*

PENDAHULUAN

Laporan keuangan pemerintah merupakan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan negara/daerah selama suatu periode anggaran. Rencana keuangan tahunan pemerintah disusun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pelaksanaan APBN harus transparan sehingga tidak menimbulkan konflik dan *moral hazard* antara pemerintah

dan masyarakat. Dalam konteks sektor publik *moral hazard* dapat berupa kebohongan publik, antara lain: korupsi, kolusi dan nepotisme (Mahmudi 2007). Akuntabilitas publik dalam pelaksanaan APBN sangat penting sebagai pertanggungjawaban atas aktivitas pemerintah kepada masyarakat sebagai pemberi dana. Sektor publik sering dinilai sebagai inefisiensi, pemborosan dan sumber kebocoran dana dalam pelaksanaan anggaran, oleh karena itu tuntutan terhadap akuntabilitas publik dan pelaksanaan *good government*

governance diperlukan untuk mencegah berbagai bentuk penyimpangan.

Laporan Realisasi Anggaran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. (Lantu, Lambey, and Wangkar 2017)

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pemerintah sebagai agen dalam mengelola sumberdaya publik dan melaporkannya kepada masyarakat sebagai prinsipal. Sehingga pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Akuntabilitas publik yang baik dibuktikan dengan laporan keuangan pemerintah yang baik dan lengkap (*full disclosure*). Laporan keuangan pemerintah disusun secara berjenjang mulai dari tingkat Satuan Kerja sampai dengan tingkat kementerian/Lembaga dan harus mengacu pada Standar Akutansi Pemerintah (SAP) yang disusun oleh Komite Standar Akutansi Pemerintah dan ditetapkan dalam PP No. 71 Tahun 2010 dengan basis akrual.

Laporan keuangan disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran sebagai pertanggungjawaban pelaksana APBN pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dan

menyampaikannya kepada presiden melalui Menteri Keuangan untuk diserahkan kepada DPR setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia diberikan alokasi anggaran belanja setiap tahun anggaran dan atas pelaksanaannya berkewajiban menyusun Laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran setiap periode tahun anggaran.

Menurut buku *A Statement of Certified Public Accounting (AICPA)* dalam Sofyan Syafri (Harahap 2013) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut: "Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya. Menurut *Accounting Principle Boards (APB) Statement No.4* dalam Sofyan Syafri (2013:5) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut: "Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar memilih di antara beberapa alternatif".

Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk kepada publik untuk menjalankan roda pemerintah. Pertanggungjawaban tersebut tidak cukup dengan laporan lisan saja, namun perlu dengan didukung dengan laporan pertanggungjawaban secara tertulis. Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas

kinerja keuangan yang dicapai. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pemerintahan daerah di atur dalam undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah upaya konkrit dalam mewujudkan transparansi dana, akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban yang berupa laporan keuangan. Gubernur/Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan keuangan kepada DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh badan pemeriksaan keuangan (BPK).

Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya. Wiratna, (2015 : 1) Akuntansi sektor publik di Indonesia pada berbagai bidang yakni sebagai berikut:

1. Akuntansi Pemerintah Pusat
2. Akuntansi Pemerintah Daerah
Akuntansi Desa
3. Akuntansi Tempat Ibadah: Masjid, Gereja, Pura, Wihara
4. Akuntansi LSM (Lembaga Sosial Masyarakat)
5. Akuntansi Yayasan
6. Akuntansi Pendidikan: Sekolah, Perguruan Tinggi
7. Akuntansi Kesehatan: Puskesmas, Rumah Sakit.

Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan dalam lingkup pemerintahan,

yaitu Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah, dan satuan organisasi di lingkungan Pemerintahan Pusat/Daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi yang dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 lampiran 2, maka ruang lingkup yang mencakup Standar Akuntansi Pemerintah yaitu laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis kas menuju akrual/cash toward accrual. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara/daerah. Menurut PP Nomor 24 Tahun 2005, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sudah harus diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2005. Artinya bahwa penyajian laporan keuangan tahun 2005 sudah harus sesuai dengan Standara Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hal serupa juga terjadi pada penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010, yang meyakini bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual sudah harus diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2010.

Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa. Menurut Mardiasmo yang dikutip oleh (Meta Herlia, Fachruzzaman, and Baihaqi 2013) menyatakan terdapat beberapa alasan pentingnya anggaran sektor publik yaitu: (a) anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, (b) anggaran diperlukan

karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*), pilihan (*choise*) dan *trade offs*. (c) anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat.

Efektivitas menurut Mahmudi (2010) adalah sejauh mana unit yang dikeluarkan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Efisiensi menurut Mahmudi (2010) proses yang dilakukan untuk mengukur dan membandingkan keluaran dan masukan. Atau mengukur perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas.

Faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran bidang kesehatan yakni adanya kondisi darurat, kondisi internal Dinas Kesehatan, proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak tepat waktu dan tidak sesuai spesifikasi, adanya indikasi korupsi, dokumen pelaksanaan anggaran dan proses revisi, adanya peningkatan alokasi belanja di Dinas Kesehatan pada saat terjadi perubahan APBD, lemahnya koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan, minimnya anggaran kesehatan. (Murdani and Suherlan 2014)

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh (Lantu et al. 2017) tentang pengalokasian anggaran 2013 didapatkan bahwa anggaran belanja tahun 2013 lebih besar dibandingkan tahun 2014 dan 2015. Ini dikarenakan adanya pengadaan barang/jasa dan belanja modal baru pada tahun 2013 tersebut, sehingga pada tahun

2014 dan 2015 sudah tidak perlu pengadaan barang/jasa dan belanja modal yang baru.

Kemudian penelitian selanjutnya oleh (Sari, Mintarti, and Pattisahusiwa 2018) pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah Kota tahun 2011-2015 secara keseluruhan efisien. menurut penelitian ini bahwa pelaksanaan anggaran efisiensi dan efektif dikarenakan pengelolaan yang sudah cukup baik.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian efektivitas laporan keuangan pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan peneliti menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, artinya penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data *numeric* (angka), dengan menggunakan metode penelitian ini akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiono, 2014).

Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan dimulai tahap persiapan penelitian berupa penyusunan proposal penelitian, observasi lapangan, pengumpulan data primer dan data sekunder sampai pada tahap pengolahan data dan penarikan kesimpulan.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan cara wawancara, fokus grup Diskusi (FGD) dan pengamatan penelitian secara langsung terhadap kondisi, fenomena-fenomena dalam pengelolaan keuangan negara. Untuk data sekunder pengumpulan data dilakukan dari berbagai sumber antara lain: data omspan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, data e-rekon Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan data realisasi belanja pada SAS Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020

Metode Analisis Data

Dalam mengukur efektivitas pelaksanaan anggaran pada laporan keuangan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan peneliti menggunakan perhitungan rasio *varians* dengan rumus sebagai berikut:

$$Varians = Realisasi - Anggaran$$

Rasio analisis efektivitas atas realisasi belanja dengan membandingkannya dengan target realisasi belanja dikali 100% dengan perhitungan rasio efektivitas pelaksanaan anggaran, dengan rumus sebagai berikut:

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ Belanja}{Target\ Realisasi\ Belanja} \times 100\%$$

Pengukuran kriteria efektivitas presentasi kinerja keuangan mengacu pada kriterian efektifitas presentasi kinerja keuangan sebagaimana tertuang dalam Tabel 1. Berikut ini:

Tabel 1. Kriteria Efektifitas Presentasi Kinerja Keuangan

Presentasi Kinerja Keuangan	Kriteria
100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Dibawah 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri Nomor: 690.900.327, 1994.

Sub aspek efisiensi atas pelaksanaan kegiatan harus juga menjadi prioritas dalam analisis ini agar dapat mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi atas realisasi anggaran. Rasio efisiensi yang dihitung bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi atas belanja, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- PAKi : Pagu Anggaran Keluaran Tahun Ke-i
- CKi : Capaian Keluaran Tahun Ke-i
- RAKi : Realisasi Anggaran Tahun Ke-i

Kriterian penilaian efisiensi pelaksanaan APBN pada Direktorat Jenderal PSDKP mengaju pada kriteria pengukuran pada Tabel 2. Berikut ini:

Tabel 2. Kriteria Penilaian Efisiensi

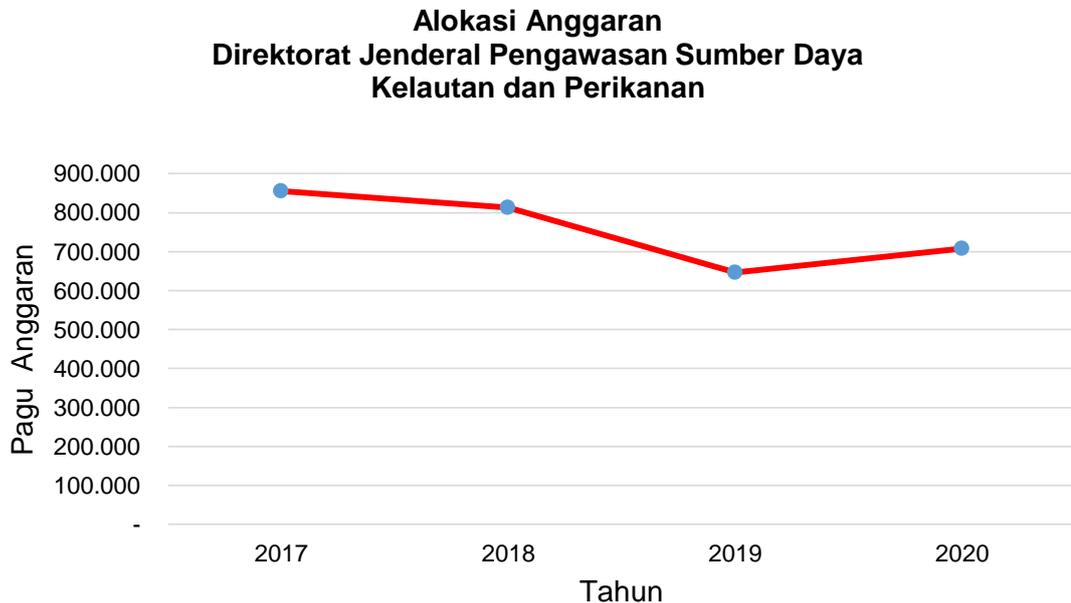
Presentasi Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Esifien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Dibawah 60%	Sangat Efisien

Sumber: Kepmendagri Nomor: 690.900.327, 1994.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data pagu anggaran yang diperoleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 berdasarkan data dari omspan Kementerian

Keuangan Republik Indonesia cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar 5,29% terlihat pada grafik alokasi anggaran pada Gambar 1. Berikut ini:



Gambar 1. Grafik Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal PSDKP

Sumber: Data Kementerian Keuangan RI, 2021

Dengan rasio varians antara realisasi dengan anggaran menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran pada kondisi wajar, hal ini ditunjukkan dari seluruh realisasi pelaksanaan anggaran dapat dipenuhi oleh pagu anggaran yang tersedia (tidak adanya pagu minus). Berikut data realisasi anggaran pada Direktorat Jenderal

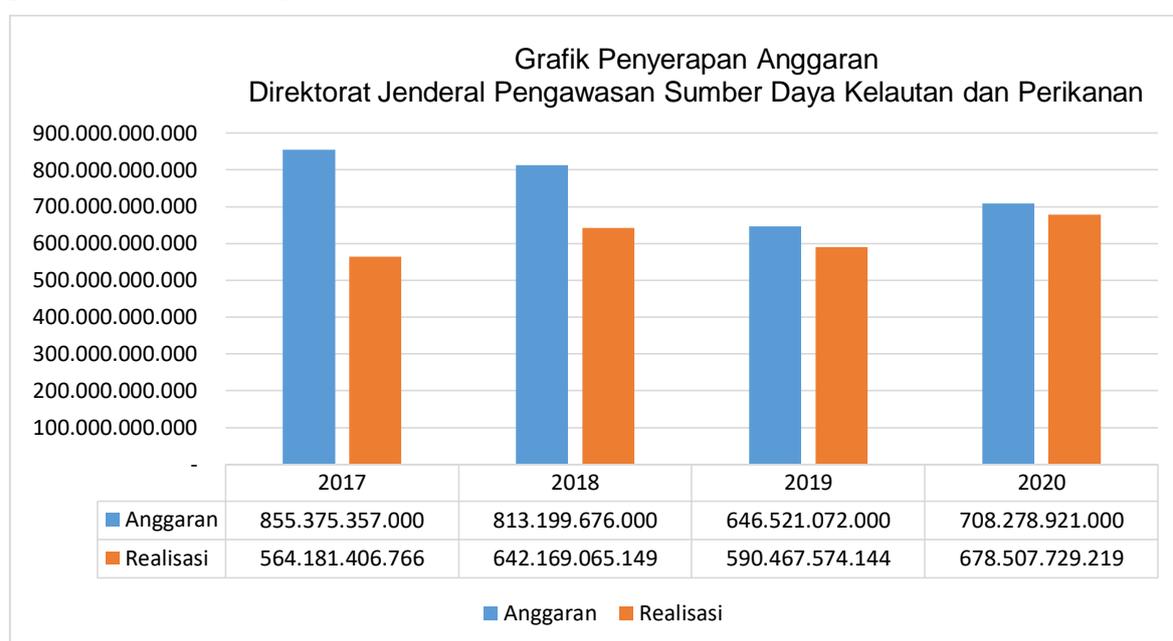
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan periode TA. 2017 – TA. 2020 yang menunjukkan kenaikan realisasi anggaran. Hal ini terlihat pada persentase data realisasi belanja negara periode tahun anggaran TA. 2017 sampai dengan TA. 2020 mengalami kenaikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Data Realisasi Anggaran Periode TA. 2017 – TA. 2020

Tahun	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase Realisasi (%)
2017	855.375.357.000	564.181.406.766	65,96
2018	813.199.676.000	642.169.065.149	78,97
2019	646.521.072.000	590.467.574.144	91,33
2020	708.278.921.000	678.507.729.219	95,80

Sumber: Susanti, 2021.

Realisasi anggaran terkecil yaitu pada periode TA. 2017 yaitu sebesar 65,96 % (Enam Puluh Lima Koma Sembilan Puluh Enam Persen) dan realisasi terbesar pada periode TA. 2020 yaitu sebesar 95,80% (Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Persen), dengan data penyerapan anggaran pada Gambar 2. Berikut ini:



Gambar 2. Grafik Penyerapan Anggaran

Sumber: Susanti A, 2021

Rasio efektivitas realisasi anggaran pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Periode TA. 2017 sampai dengan TA. 2020 dalam Tabel 4.

Tabel 4. Efektivitas Realisasi Anggaran TA. 2017 – TA. 2020

Tahun	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase Realisasi (%)
2017	855.375.357.000	564.181.406.766	65,96
2018	813.199.676.000	642.169.065.149	78,97
2019	646.521.072.000	590.467.574.144	91,33
2020	708.278.921.000	678.507.729.219	95,80
Σ	3.023.375.026.000	2.475.325.775.278	81,87

Sumber: Susanti A, 2021

Efektivitas pelaksanaan kegiatan pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan periode TA. 2017 sampai dengan TA. 2020 adalah sebesar 81,87% masuk pada kriteria cukup efektif yaitu dalam range 80% - 90% (range ketiga pada kriteria efektivitas

presentasi kinerja keuangan). Analisis efisiensi atas pelaksanaan anggaran pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menunjukkan data cukup efisien yaitu pada Tabel 5.

Tabel 5. Persentase Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Periode TA. 2017-TA. 2020

Tahun	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase Realisasi (%)
2017	855.375.357.000	564.181.406.766	94,13
2018	813.199.676.000	642.169.065.149	90,49
2019	646.521.072.000	590.467.574.144	76,93
2020	708.278.921.000	678.507.729.219	52,42
Σ	3.023.375.026.000	2.475.325.775.278	88,97

Sumber: Susanti A, 2021

Pelaksanaan kegiatan pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan periode TA. 2017 – TA. 2020 secara average masuk pada kriteria cukup efisien yaitu sebesar 88,97%, walaupun pada TA. 2017 dan TA. 2018 pelaksanaan anggaran kurang efisien dengan persentasi efisiensi sebesar 94,13% dan 90,49%.

KESIMPULAN

Analisis efektivitas dan efisiensi laporan keuangan pada Direktorat Jenderal Pengawasan periode TA. 2017-TA. 2020 untuk realisasi pelaksanaan anggaran disimpulkan bahwa:

1. Alokasi anggaran yang diberikan kepada Direktorat Jenderal PSDKP untuk periode TA.2017 – TA. 2020 mengalami penurunan dengan persentase rata-rata penurunan sebesar 5,29%;

2. Pada rasio *varians* menunjukkan realisasi anggaran yang baik hal ini dikarenakan tidak ada realisasi yang tidak ada pagu anggarannya (tidak terdapat pagu minus);
3. Realisasi atas pelaksanaan anggaran pada TA. 2017 merupakan realisasi penyerapan anggaran terendah yaitu 65, 96% yang berarti bahwa efektivitas pelaksanaan anggaran masuk pada kriteria kurang efektif dan pada TA. 2020 terjadi perubahan positif dengan realisasi meningkat menjadi 95,80% dengan kriteria efektivitas presentasi kinerja “Efektif”;
4. Tingkat efisiensi pelaksanaan kegiatan pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan periode TA. 2017 – TA. 2020 menunjukan cukup efisien dengan nilai rasio efisiensi sebesar 88,97%.

Implikasi kebijakan yang harus dilakukan berdasarkan hasil analisis efektivitas dan efisiensi laporan keuangan pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah:

1. Penyusunan rencana penarikan dana (RPD) disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan;
2. Efektivitas pelaksanaan kegiatan lebih ditingkatkan dengan merealisasikan anggaran tepat waktu dan pencapaian sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan agar memberikan multiplier efek bagi masyarakat;
3. Aspek efisiensi tetap menjadi perhatian dalam pelaksanaan anggaran agar realisasi anggaran tepat sasaran, efisien dan tidak terdapat kebocoran atau penyalahgunaan anggaran.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai yang telah berkontribusi dalam penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Sofyan Syafri. 2013. *Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Direktorat Jenderal PSDKP. 2017. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017.
- Direktorat Jenderal PSDKP. 2018. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018.
- Direktorat Jenderal PSDKP. 2019. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019.
- Direktorat Jenderal PSDKP. 2020. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020.
- Lantu, Christover, Linda Lambey, and Anneke Wangkar. 2017. “ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF BUDGETREALIZATION IN NORTH SULAWESI PROVINCIAL FORESTRY SERVICE.” 11.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Meta Herlia, Fachruzzaman, and Baihaqi. 2013. “Pengaruh Implementasi Anggaran Partisipatif, Transparansi, Akuntabilitas Dan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.” *Jurnal Fairness* Volume 3, Nomor 2, 2013: 213-230.

Murdani, Murdani, and Ade Suherlan. 2014. "ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENYERAPAN ANGGARAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DALAM APBD KABUPATEN ACEH BESAR PADA PERIODE 2008-2012." *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi* 3(2). doi: 10.15408/sigf.v3i2.2057.

Sari, Dwi Nofita, Sri Mintarti, and Salmah Pattisahusiwa. 2018. "Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja." *KINERJA* 15(1):38. doi: 10.29264/jkin.v15i1.4051.